

# **HUKUM PIDANA LINGKUNGAN**

**DR. RUSLAN RENGGONG, S.H. M.H.**





## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Permasalahan Lingkungan Hidup	1
B. Pengertian Lingkungan Hidup	10
C. Pengertian Hukum Lingkungan	14
D. Pengertian Hukum Pidana	23
E. Istilah Hukum Pidana Lingkungan	28
<b>BAB 2 KERJA SAMA INTERNASIONAL BIDANG</b>	
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>31</b>
A. Konferensi Stockholm	33
B. Konferensi Nairobi	38
C. Konferensi Rio de Jeneiro	39
D. Konferensi Johannesburg	45
E. Konferensi Bali	47
F. Konferensi Kopenhagen	47
G. Kerja Sama Negara-negara ASEAN	48
<b>BAB 3 POKOK-POKOK PENGATURAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>55</b>
A. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup	57
B. Perencanaan dan Pemanfaatan	59
C. Pengelolaan dan Pemeliharaan	60
D. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sistem Informasi	77
E. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah	78
F. Hak, Kewajiban dan Larangan	81
G. Peran Serta Masyarakat	86
H. Pengawasan dan Sanksi Administrasi	88
I. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	91

<b>BAB 4 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI</b>	<b>99</b>
A. Komponen Subjek Hukum	99
B. Subjek Hukum Korporasi	101
C. Doktrin Dapat Dipidananya Korporasi	107
D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	113
<b>BAB 5 PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN</b>	<b>121</b>
A. Penyidikan	121
B. Pembuktian	134
<b>BAB 6 TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>143</b>
A. Pengertian Tindak Pidana	143
B. Unsur-unsur Tindak Pidana	146
C. Delik Materiil dan Delik Formil	152
D. Perumusan Tindak Pidana Lingkungan	156
1. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	157
2. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	169
3. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	174
4. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	183
5. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perkebunan	207
6. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	212
7. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	225
8. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	230
9. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	233



10. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	236
11. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	238
12. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	243
13. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	249
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	<b>255</b>
<b>TENTANG PENULIS</b>	<b>259</b>